

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdurrahman, 1994, *Kedudukan hukum adat dalam perundang-undangan agraria Indonesia*, Akademika Presindo, Jakarta.
- , 1992, *Kedudukan Hukum Adat dalam Perundang-Undangan Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bernhard Limbong, 2014. *Politik Pertanahan*, Margaretha Pustaka, Jakarta.
- Boedi Harsono, 2004, *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Penerbit Djambatan, Jakarta, Edisi Revisi.
- , 2002, *Menuju penyempurnaan hukum tanah nasional*, Trisakti, Jakarta.
- , 2000, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- , 1999, *Sejarah pembentukan UUPA, Isi dan pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- , 1997, *Simposium undang-undang pokok agraria dan kedudukan tanah-tanah adat dewasa ini*, BPHN Kalsel dan FH. Unilam, Bina Cipta.
- Bintoro Tjokromidjojo, 2000, *Teori Strategi Pembangunan Nasional*, P.T. Gunung Agung, Jakarta.
- Djoko Walijatun, 1997, *Tanah Dan Pertanahan*, STPN, Yogyakarta.
- G.Kartasapoetra, 1984, *Hukum Tanah: Jaminan UUPA bagi Keberhasilan Pendaaygunaan Tanah*, Rineka Cipta, Bandung.
- Hermit Herman, 2004. *Cara Memperoleh Sertipikat Tanah Hak Milik, Tanah Negara dan Tanah Pemda*. Mandar Maju, Bandung.
- Muhammad Yamin., 2006, *Problematika Mewujudkan Jaminan Kepastian Hukum Atas Tanah Dalam Pendaftaran Tanah*, USU, Medan.
- P. Sondang Siagian, 1985, *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta.
- R.Subekti dan R.Tjitrosudiby., 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cetakan Ketigapuluh dua*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Supriadi, 2009, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Santoso Satroepetro, 1982, *Pelaksanaan Latihan*, Gramedia, Jakarta.

Urip Santoso, 2011, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

The Liang Gie, dan sutarto, 1997, *Pengertian, Kedudukan dan Perincian Ilmu Administrasi*, Karya Kencana, Yogyakarta.

Widhi Handoko, 2014, *Kebijakan Hukum Pertanahan Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta.

## **B. UNDANG-UNDANG**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2015 Tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Surat Edaran Kakanwil BPN Provinsi Sumatera Barat No. 500/88/BPN/-2007.

## **C. KAMUS/DOKUMEN**

Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Barat, *Sumatera Barat Dalam Angka*, 2012.

W,J,S, Poerwaarminta, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

## **D. WEBSITE/ INTERNET**

<http://sumbar.atrbpn.go.id/>. Diakses pada tanggal 12 Juli 2019.